

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPALA SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK)

**Oleh
Thoyyibah Nurhikmah Sanggem**

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merusak integritas dunia Pendidikan, hal tersebut dikarenakan Ijazah yang seharusnya menjadi bukti pencapaian akademik justru sering disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk dalam proses seleksi pekerjaan maupun penerimaan anggota kepolisian. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa terbukti secara sah dan tanpa paksaan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan sehingga berpotensi tidak memberikan efek jera serta menimbulkan persoalan terhadap efektivitas pemidanaan, khususnya mengingat dampak perbuatan terdakwa terhadap integritas dunia pendidikan dan proses seleksi penerimaan anggota Polri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar penjatuhan pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah dilakukan secara lebih proporsional dengan memperhatikan kedudukan pelaku sebagai pendidik serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik dan dunia pendidikan. Selain itu, hakim diharapkan dapat menyeimbangkan pertimbangan yang meringankan dengan

kerusakan moral dan hilangnya kepercayaan masyarakat akibat perbuatan pemalsuan ijazah, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan keadilan, efek jera, serta perlindungan terhadap nilai kejujuran dalam sistem pendidikan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Ijazah, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF A SCHOOL PRINCIPAL COMMITTING THE CRIME OF DIPLOMA FORGERY (A Study of Court Decision Number 1093/Pid.B/2023/PN TJK)

By
Thoyyibah Nurhikmah Sanggem

Forgery of academic diplomas constitutes a form of criminal offense that undermines the integrity of the education system, as are instead often misused to obtain personal benefits, including in job recruitment processes and the selection of police personnel. One case that is the focus of this research is the criminal act of diploma forgery committed by a school principal, as stated in Decision Number 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. This study aims to identify the form of criminal liability imposed on the school principal who committed the diploma forgery and to analyze the legal reasoning used by the judge in rendering the verdict.

The research method employed is normative and empirical juridical research, using a statutory approach and a case approach. Research data were obtained through literature studies derived from laws and regulations, legal literature, and relevant court decisions.

The results of the research and discussion indicate that the criminal liability of the school principal in Decision Number 1093/Pid.B/2023/PN TJK is based on the principle of culpability, wherein the defendant was proven legally and without coercion to have committed the criminal act of ordering the inclusion of false information into an authentic deed. For this act, the defendant was sentenced to five (5) months of imprisonment. Thereby raising concerns regarding the effectiveness of punishment, particularly in light of the impact of the defendant's actions on the integrity of the education system and the police recruitment process.

Based on the findings of this study, it is recommended that sentencing for perpetrators of diploma forgery be imposed more proportionally by taking into account the offender's position as an educator and the impact of the act on public interests and the education sector. In addition, judges are expected to balance mitigating considerations with the moral damage and loss of public trust resulting from diploma forgery, so that the verdict rendered can realize justice, provide a deterrent effect, and protect the values of honesty within the education system.

Keywords : **Criminal Liability, Diploma Forgery, Judicial Consideration.**